

LAPORAN KINERJA (LKj) TA. 2021



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.

Laporan ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Perubahan Tahun 2021 yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 memuat Capaian Kinerja Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPENDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan dapat memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Kritik dan saran dari semua pihak kami harapkan guna penyempurnaan dalam penyusunan dimasa mendatang.

Kuala Tungkal,

2022

Plt. KEPALA BAPENDA



HERRI YANSA WIJAYA, S.Kom, ME, M.Kom

NIP. 19800702 201101 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Susunan Organisasi.....	4
1.5. Sistematika Penyajian.....	8
Bab II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	9
2.2. Perjanjian Kinerja	11
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Bapenda	12
B. Realisasi Anggaran	50
Bab IV PENUTUP.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang telah ditindaklanjuti dengan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan mengenai susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah di tetapkan dengan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 memuat Hasil Pengukuran Sasaran Strategis dan Pengukuran Kinerja Program/ Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilaksanakan pada Tahun 2021, sebagai Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Bupati Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan salah satu unsur pemerintah daerah dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Isu – isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan Program dan Kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan (2021-2026) sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengelola objek pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah

2. Meningkatkan kemampuan aparaturnya pemungut pajak daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah
3. Memenuhi fasilitas dan meningkatkan pelayanan pemungutan pajak daerah
4. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah
5. Meningkatkan kualitas data base dalam pengelolaan potensi pajak daerah
6. Meningkatkan kerjasama pengelolaan kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 / 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Menteri PAN Nomor PER / 09 / M. PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4).
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk Pertanggung Jawaban Instansi Pemerintah Selaku Penyelenggaraan Negara baik di tingkat Pusat maupun di daerah yang berisikan tentang Informasi Keberhasilan maupun Kegagalan melaksanakan Misi Kepala Daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Serta Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah

1. Kedudukan dan Tugas Pokok

Berdasarkan Perbup Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

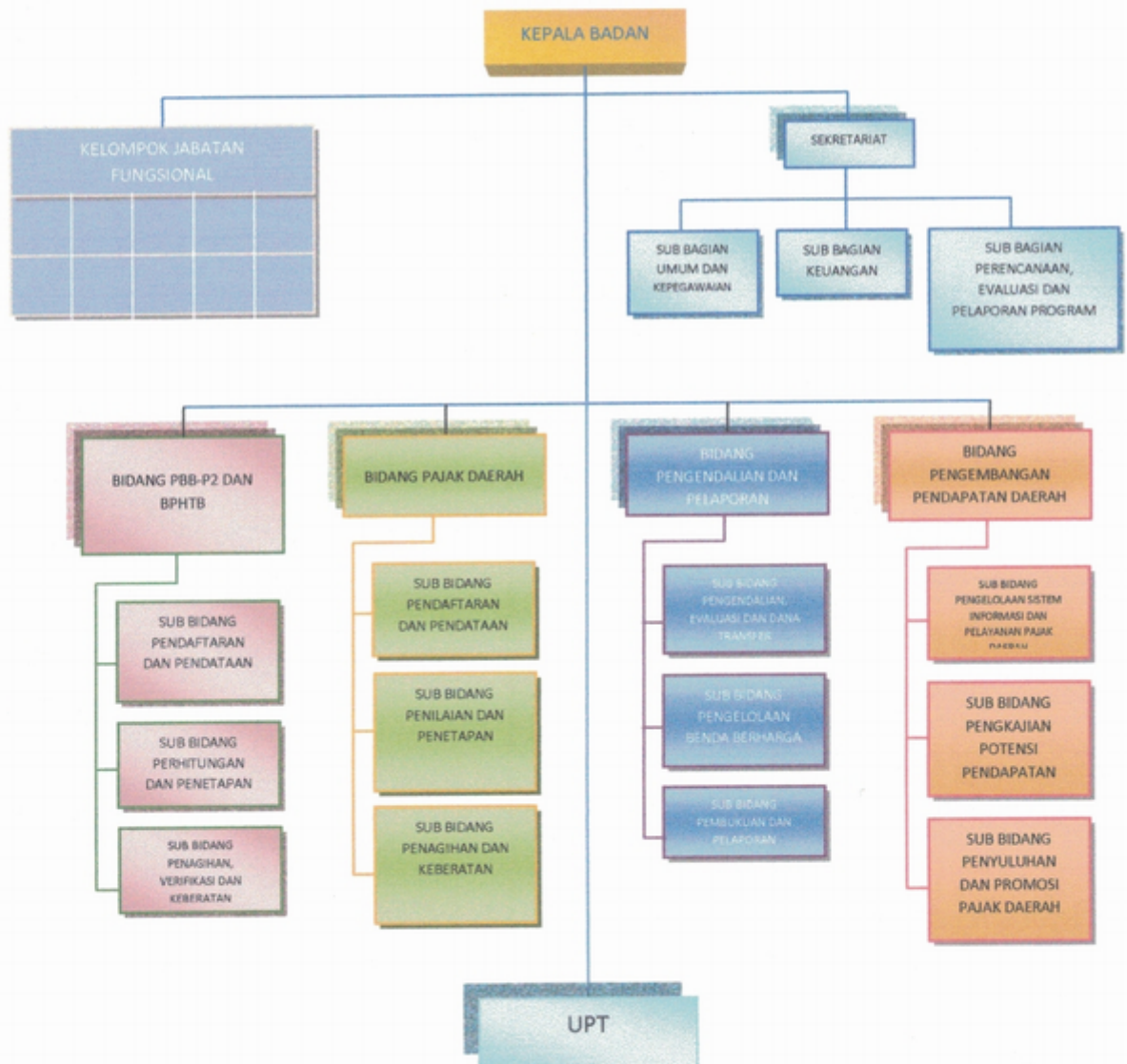
2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan kebijakan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pembangunan Pendapatan Daerah;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pembangunan Pendapatan Daerah;

- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pembangunan Pendapatan Daerah;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pembangunan Pendapatan Daerah; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah



Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub bagian Umum Kepegawaian
 2. Sub bagian Keuangan
 3. Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
- b. Bidang PBB-P2 dan BPHTB terdiri atas :
 1. Sub bidang Pendaftaran dan Pendataan
 2. Sub bidang Perhitungan dan Penetapan
 3. Sub bidang Penagihan, Verifikasi dan Keberatan
- c. Bidang Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
 1. Sub bidang Pendaftaran dan Pendataan
 2. Sub bidang Penilaian dan Penetapan
 3. Sub bidang Penagihan dan Keberatan
- d. Bidang Pengendalian dan Pelaporan terdiri atas :
 1. Sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Dana Transfer
 2. Sub bidang Pengelolaan Benda Berharga
 3. Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan
- e. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri atas :
 1. Sub bidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Pelayanan Pajak Daerah
 2. Sub bidang Pengkajian Potensi Pendapatan
 3. Sub bidang Penyuluhan dan Promosi Pajak Daerah

4. Sumber Daya Aparatur

Personil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 sejumlah 130 orang yang terdiri dari 48 orang PNS, dan 82 orang tenaga kerja kontrak (TKK) yang di distributorkan ke 5 bidang sesuai dengan struktur organisasi dan tupoksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

No	Bidang	PNS	CPNS	TKK/TKS	Jumlah
1.	Sekretariat	12 Orang	-	33 Orang	45 Orang
2.	Pajak Daerah	9 Orang	-	13 Orang	22 Orang
3.	PBB-P2 dan BPHTB	13 Orang	-	16 Orang	29 Orang
4.	Pengendalian dan Pelaporan	8 Orang	-	9 Orang	17 Orang
5.	Pengembangan Pendapatan Daerah	6 Orang	-	11 Orang	17 Orang
Jumlah		48 Orang	-	82 Orang	130 Orang

Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, sarana kerja yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah adalah :

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Gedung	1	Bangunan 3 lantai
2	Listrik	1	Jaringan
3	Sumur Bor	1	Buah
4	Telpon	1	Jaringan
5	Area Parkir	1	Area
6	Ruang Rapat	1	Ruang
7	Musholla	1	Bangunan
8	Kendaraan Roda 4	6	Unit
9	Kendaraan Roda 2	33	Unit
10	Meja Rapat	3	Set
11	AC	46	Unit
12	Komputer PC	81	Unit
13	Komputer Notebook	38	Unit
14	Meja Kerja	43	Unit
15	Kursi Kerja	49	Unit
16	Filling Cabinet	3	Buah
17	Rak Arsip	2	Buah
18	Infokus	4	Unit
19	Jaringan Internet	1	Jaringan
20	Area Taman Luar	1	Area
21	Lemari Arsip	14	Unit

5. Anggaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka seluruh kegiatan yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 pada APBDP Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam DPA Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran
1	Pendapatan (PAD)	Rp. 36.121.319.500
2	Belanja	Rp. 11.970.189.835
	- Belanja Operasional	Rp. 11.756.278.927
	- Belanja Modal	Rp. 213.910.908

1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

 A. Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

 B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahunan yang dipergunakan sebagai arah dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat.

Visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 yaitu **“MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH” (BERKUALITAS, EKONOMI MAJU, RELIGIUS, KOMPETITIF, AMAN DAN HARMONIS).**

Visi tersebut diimplementasikan kedalam 5 misi, yaitu:

- Misi 1 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berahklak.
- Misi 2 : Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan demokratis.
- Misi 3 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.
- Misi 4 : Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- Misi 5 : Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai kekota

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

Secara umum tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkontribusi langsung

dalam mendukung pencapaian Misi 3 : Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik.

Tujuan yang ingin dicapai pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah Optimalisasi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah dengan Indikator Utama “Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah”.

**PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021 s/d TAHUN 2026
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Uraian	PROYEKSI PENERIMAAN PENDAPATAN (Rupiah)					
		2021	2022 (Base Line)	2023	2024	2025	2026
	PENDAPATAN DAERAH	1,247,761,849,420.00	1,150,000,000,000.00	1,199,800,001,000.00	1,243,840,001,500.00	1,299,812,800,000.00	1,364,803,440,500.00
I	Pendapatan Asli Daerah	120,000,000,000.00	96,135,351,000.00	101,660,000,000.00	111,945,600,000.00	123,482,215,500.00	136,480,344,500.00
1	Pajak Daerah	36,596,319,500.00	36,304,197,500.00	38,122,500,000.00	41,979,600,000.00	45,688,419,500.00	49,815,325,500.00
2	Retribusi Daerah	3,175,100,000.00	2,295,170,000.00	3,558,100,000.00	5,597,280,000.00	7,408,933,000.00	9,553,624,500.00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,238,139,900.00	11,226,000,000.00	12,707,500,000.00	13,963,200,000.00	15,435,277,000.00	17,060,043,000.00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	66,990,440,600.00	46,309,983,500.00	47,271,900,000.00	50,375,520,000.00	54,949,586,000.00	60,051,351,500.00
II	Dana Transfer	1,068,436,649,420.00	1,010,038,340,000.00	1,052,342,562,500.00	1,083,807,091,000.00	1,125,838,908,500.00	1,175,306,836,500.00
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	244,465,259,000.00	244,518,751,000.00	251,864,313,500.00	259,409,943,000.00	269,786,341,000.00	281,926,726,000.00
2	Dana Alokasi Umum	495,245,924,000.00	479,384,508,000.00	488,972,198,500.00	503,641,364,500.00	518,750,605,500.00	534,313,123,500.00
3	Dana Alokasi Khusus	166,169,575,000.00	117,228,229,000.00	117,957,501,000.00	117,382,291,500.00	123,562,447,000.00	134,341,003,500.00
4	DID (Dana Insentif Daerah)	25,251,347,000.00	7,575,404,000.00	25,251,347,000.00	27,776,482,000.00	30,554,129,500.00	33,609,542,500.00
5	Dana Desa dan Desa Adat	109,187,748,000.00	109,187,748,000.00	113,565,258,000.00	118,097,468,500.00	122,821,367,000.00	127,734,221,500.00
6	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	46,616,796,420.00	52,144,709,000.00	54,751,944,500.00	57,489,541,500.00	60,364,018,500.00	63,382,219,500.00
7	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintahan Daerah Lainnya	1,500,000,000.00	0.00	0.00			

No	Uraian	PROYEKSI PENERIMAAN PENDAPATAN (Rupiah)					
		2021	2022 (Base Line)	2023	2024	2025	2026
III	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	39,325,200,000.00	43,825,300,000.00	45,797,438,500.00	48,087,310,500.00	50,491,676,000.00	53,016,259,500.00
1	Hibah	39,325,200,000.00	43,825,300,000.00	45,797,438,500.00	48,087,310,500.00	50,491,676,000.00	53,016,259,500.00
2	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Dana Penyesuaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Lembar/ Dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Tanjung Jabung Barat kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna melaksanakan Program/Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penerimaan pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatn Daerah	Persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	7,98%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	- Indeks Kepuasan Masyarakat - Nilai Akip	78,24 68,99

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur berdasarkan Target Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 yang dijadikan target Tahunan pada Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 :

Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	7,98	9,77	122,43%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,24	78,88	100,82%
		- Nilai AKIP	68,99	60,85	88,20%

Pengukuran kinerja terhadap target indikator pada Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 yang terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. SASARAN 1 :

Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2021 dengan Target 7,98%.

Sebagai Dasar untuk mengukur Capaian Kinerja Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 yakni Realisasi dari Target Pendapatan Daerah

Kab.Tanjung Jabung Barat pada APBDP Tahun 2021 yang telah ditetapkan pada Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 sebagai berikut :

**Rekapitulasi Laporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan PAD Yang Dikelola
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021**

No	Jenis Penerimaan	Penerimaan Daerah			PAD yang dikelola BAPENDA		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pajak Daerah	36.121.319.500,00	31.752.296.480,00	87,90	36.121.319.500,00	31.752.296.480,00	87,90
	- Pajak Hotel	119.950.000,00	185.104.100,00	154,32	119.950.000,00	185.104.100,00	154,32
	- Pajak Restoran	3.620.000.000,00	4.131.923.262,00	114,14	3.620.000.000,00	4.131.923.262,00	114,14
	- Pajak Hiburan	11.840.000,00	3.594.500,00	30,36	11.840.000,00	3.594.500,00	30,36
	- Pajak Reklame	436.000.000,00	354.084.745,00	81,21	436.000.000,00	354.084.745,00	81,21
	- Pajak Penerangan Jalan	18.125.239.000,00	18.078.230.466,00	99,74	18.125.239.000,00	18.078.230.466,00	99,74
	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.524.390.500,00	1.584.866.425,00	103,97	1.524.390.500,00	1.584.866.425,00	103,97
	- Pajak Air Bawah Tanah	63.000.000,00	21.111.566,00	33,51	63.000.000,00	21.111.566,00	33,51
	- Pajak Sarang Burung Walet	200.000.000,00	115.044.800,00	57,52	200.000.000,00	115.044.800,00	57,52
	- Pajak PBB P2	5.500.000.000,00	4.640.360.253,00	84,37	5.500.000.000,00	4.640.360.253,00	84,37
	- Pajak BPHTB	6.500.000.000,00	2.607.409.963,00	40,11	6.500.000.000,00	2.607.409.963,00	40,11
	- Pajak Parkir	20.900.000,00	30.566.400,00	146,25	20.900.000,00	30.566.400,00	146,25
2.	Retribusi Daerah	3.430.808.796,00	2.566.363.152,00	74,80	-	-	-
	- Retribusi Jasa Umum	1.740.708.796,00	1.228.027.533,00	70,55	-	-	-
	- Retribusi Jasa Usaha	788.600.000,00	781.882.200,00	99,15	-	-	-
	- Retribusi Perizinan Tertentu	901.500.000,00	556.453.419,00	61,73	-	-	-
3.	Hasil Pengelola Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.238.139.900,00	10.719.917.975,50	80,98	-	-	-
	- Bank Jambi (Deviden)	11.732.139.900,00	9.638.772.829,50	82,16			
	- Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tanggo Rajo	1.506.000.000,00	1.081.145.146,00	71,79			
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	67.659.325.510,00	76.867.378.049,89	113,61	10.000.000,00	407.976,00	4,08
	- Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	393.000.000,00	517.783.060,00	131,75	-	-	-
	- Penerimaan Jasa Giro	700.000.000,00	2.075.367.698,41	296,48	-	-	-
	- Pendapatan Bunga Deposito	12.550.000.000,00	12.601.452.027,92	100,41	-	-	-
	- Tuntutan Kerugian Barang Daerah	-	4.516.000,00	-	-	-	-
	- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	119.174.666,26	-	-	-	-
	- Pendapatan Denda Pajak	10.000.000,00	407.976,00	4,08	10.000.000,00	407.976,00	4,08
	- Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-	-	-	-
	- Pendapatan Dari Pengembalian	5.810.000.000,00	7.854.143.298,30	135,18	-	-	-
	- Pendapatan BLUD pada FKTP	957.109.000,00	1.029.188.000,00	107,53	-	-	-
	- Pendapatan Kapitasi pada FKTP	10.494.200.000,00	9.963.619.875,00	94,94	-	-	-
	- Pendapatan BLUD Rumah Sakit	36.350.000.000,00	42.696.273.188,00	117,46	-	-	-
	- Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	395.016.510,00	5.452.260,00	1,38	-	-	-
	Jumlah PAD	120.449.593.706,00	121.905.955.657,39	101,21	36.131.319.500,00	31.752.704.456,00	87,88

Untuk Mengukur Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah dapat Kita lihat pada Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 dengan Formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi PAD Th 2021}}{\text{Target Pendapatan Daerah pada Renstra /RPJMD Th 2021}} \times 100\%$$

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 Rp.121.905.955.657,39 dan Target Pendapatan Daerah pada Renstra/RPJMD Tahun 2021 Sebesar RP. 1.247.761.849.420,00 Jadi, Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp. 121.905.955.657,39}}{\text{Rp. 1.247.761.849.420,00}} \times 100 = 9,77\%$$

Sedangkan mengukur capaian kinerja dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} = \frac{9,77\%}{7,98\%} = 122,43\%$$

Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2021 dari Target 7,98% terealisasi 9,77% dengan Capaian Kinerja 122,43%. Yang disebabkan pada Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Target Rp. 67.659.325.510,00 Terealisasi sebesar Rp. 76.867.378.049,89 atau 113,61 Yaitu pada Penerimaan antara lain : Hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan, Keuangan Jasa Giro, Deposito, Penerimaan Tuntutan Atas Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Dari Pengembalian dan Pendapatan BLUD.

2. SASARAN 2 :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dengan Indikator :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 78,24

Hasil Survei yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengukur IKM terhadap Pelayanan Pajak Daerah dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2021 melalui pengisian Kuisioner oleh 200 Responden dengan 9 unsur penilaian antara lain:

1. Persyaratan Pelayanan
2. Prosedur Pelayanan
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya / Tarif Pelayanan
5. Produk / Hasil Pelayanan
6. Kemampuan Petugas Pelayanan
7. Perilaku Petugas Pelayanan
8. Maklumat Pelayanan
9. Mekanisme Pengaduan Pelayanan

Dengan hasil perhitungan mendapatkan total nilai persepsi perunsur 5.636 dan Total Nilai unsur yang terisi 1.800 dikali dengan nilai penimbang 25 dengan formulasi:

$$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$IKM = \frac{5.636}{1.800} \times 25 = 78,24$$

Jadi, Capaian Nilai IKM terhadap Pelayanan Pajak Daerah pada Tahun 2021 terealisasi 78,24 dari target 77 dengan capaian kinerja 101,61%.

- Nilai AKIP

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap pemenuhan Dokumen Perencanaan, Implementasi Pelaporan dan Evaluasi SAKIP Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari target Nilai 68,99 terealisasi 60,85 dengan capaian 88,20%.

- **Capaian Kinerja PAD Yang Dikelola Bapenda Tahun 2021**

PAD yang dikelola Bapenda pada Tahun 2021 yakni Pajak Daerah yang terdiri dari 11 jenis Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah (Pendapatan Denda Pajak Daerah) Penerimaan Pendapatan untuk Pajak Daerah dari target sebesar Rp. 36.121.319.500,00 terealisasi sebesar Rp. 31.752.296.480,00 dengan capaian 87,90% dengan rincian sebagai berikut :

1. Pajak Hotel dari target sebesar Rp. 119.950.000,00 terealisasi sebesar Rp. 185.104.100,00 dengan capaian 154,32 %
2. Pajak Restoran dari target sebesar Rp. 3.620.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.131.923.262,00 dengan capaian 114,14 %
3. Pajak Hiburan dari target sebesar Rp. 11.840.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.594.500,00 dengan capaian 30,36 %
4. Pajak Reklame dari target sebesar Rp. 436.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 354.084.745,00 dengan capaian 81,21 %
5. Pajak Penerangan Jalan dari target sebesar Rp. 18.125.239.000,00 terealisasi sebesar Rp. 18.078.230.466,00 dengan capaian 99,74 %
6. Pajak Parkir dari target sebesar Rp. 20.900.000,00 terealisasi sebesar Rp. 30.566.400,00 dengan capaian 146,25 %
7. Pajak Air Bawah Tanah dari target sebesar Rp. 63.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 21.111.566,00 dengan capaian 33,51 %
8. Pajak Sarang Burung Walet dari target sebesar Rp. 200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 115.044.800,00 dengan capaian 57,52 %
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari target sebesar Rp. 1.524.390.500,00 terealisasi sebesar Rp. 1.584.866.425,00 dengan capaian 103,97 %
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dari target sebesar Rp. 5.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.640.360.253,00 dengan capaian 84,37 %

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari target sebesar Rp. 6.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.607.409.963,00 dengan capaian 40,11%

Sedangkan untuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah yaitu Pendapatan Denda Pajak dari target Rp. 10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 407.976,00 atau 4,08%.

Berdasarkan Rekapitulasi Laporan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 yang terdiri dari 11 jenis Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah hanya terealisasi sebesar 87,88%, ini disebabkan :

Karena Masih Adanya pandemi Covid-19, aktivitas masyarakat dibatasi demi mencegah penularan Covid-19 sehingga berimbas kepada sektor ekonomi.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Penerimaan Pajak Daerah yang dikelola Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan dilaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi secara Optimal dengan cara :

- a. Melakukan Pendataan Terhadap Subjek Dan Objek Pajak Daerah
- b. Meningkatkan Koordinasi Dengan Instansi Terkait
- c. Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian Penerimaan Daerah
- d. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Melalui Kegiatan Penyuluhan Pajak Pajak Daerah
- e. Terus Berupaya Menggali Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.

Capaian Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja	TAHUN					
		2020			2021		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	PAJAK DAERAH	29.277.086.500,00	30.830.634.493,00	105,31	36.121.319.500,00	31.752.296.480,00	87,90
	- Pajak Hotel	499.950.000,00	150.773.500,00	30,16	119.950.000,00	185.104.100,00	154,32
	- Pajak Restoran	2.565.856.000,00	3.001.732.553,00	116,99	3.620.000.000,00	4.131.923.262,00	114,14
	- Pajak Hiburan	11.840.000,00	2.850.000,00	24,07	11.840.000,00	3.594.500,00	30,36
	- Pajak Reklame	351.200.000,00	294.003.877,00	83,71	436.000.000,00	354.084.745,00	81,21
	- Pajak Penerangan Jalan	16.750.000.000,00	18.415.493.504,00	109,94	18.125.239.000,00	18.078.230.466,00	99,74
	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	901.140.500,00	1.039.999.150,00	115,41	1.524.390.500,00	1.584.866.425,00	103,97
	- Pajak Air Bawah Tanah	31.200.000,00	17.340.700,00	55,58	63.000.000,00	21.111.566,00	33,51
	- Pajak Sarang Burung Walet	195.000.000,00	80.222.000,00	41,14	200.000.000,00	115.044.800,00	57,52
	- Pajak BPHTB	3.500.000.000,00	3.317.048.503,00	94,77	6.500.000.000,00	2.607.409.963,00	40,11
	- PBB P2	4.450.000.000,00	4.487.054.306,00	100,83	5.500.000.000,00	4.640.360.253,00	84,37
	- Pajak Parkir	20.900.000,00	24.116.400,00	115,39	20.900.000,00	30.566.400,00	146,25
2.	RETRIBUSI DAERAH	1.438.384.780,00	1.896.201.671,00	131,83	3.430.808.796,00	2.566.363.152,00	74,80
	- Retribusi Jasa Umum	402.964.780,00	595.963.000,00	147,89	1.740.708.796,00	1.228.027.533,00	70,55
	- Retribusi Jasa Usaha	501.320.000,00	511.925.800,00	102,12	788.600.000,00	781.882.200,00	99,15
	- Retribusi Perizinan Tertentu	534.100.000,00	788.312.871,00	147,60	901.500.000,00	556.453.419,00	61,73
3.	HASIL PENGELOLA KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	10.280.256.000,00	10.663.362.645,85	103,73	13.238.139.900,00	10.719.917.975,50	80,98
	- Bank Jambi (Deviden)	9.120.256.000,00	9.602.267.383,48	105,29	11.732.139.900,00	9.638.772.829,50	82,16
	- Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tanggo Rajo	1.160.000.000,00	1.061.095.262,37	91,47	1.506.000.000,00	1.081.145.146,00	71,79
4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	62.457.980.389,93	72.119.310.492,35	115,47	67.659.325.510,00	76.867.378.049,89	113,61
	- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	667.250.000,00	936.226.900,00	140,31	393.000.000,00	517.783.060,00	131,75
	- Penerimaan Jasa Giro	700.000.000,00	1.859.096.548,97	265,59	700.000.000,00	2.075.367.698,41	296,48
	- Pendapatan Bunga Deposito	11.701.448.379,93	13.224.325.686,75	113,01	12.550.000.000,00	12.601.452.027,92	100,41
	- Tuntutan Kerugian Barang Daerah	-	4.660.592.228,79	-	-	4.516.000,00	-
	- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	92.576.517,14	-	-	119.174.666,26	-
	- Pendapatan Denda Pajak	2.000.000,00	1.372.530,00	68,63	10.000.000,00	407.976,00	4,08
	- Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-	-	-	-
	- Pendapatan Dari Pengembalian	4.678.516.510,00	3.253.008.422,70	69,53	5.810.000.000,00	7.854.143.298,30	135,18
	- Pendapatan BLUD pada FKTP	623.000.000,00	2.673.921.468,00	429,20	957.109.000,00	1.029.188.000,00	107,53
	- Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.085.765.500,00	10.230.125.452,00	101,43	10.494.200.000,00	9.963.619.875,00	94,94
	- Pendapatan BLUD Rumah Sakit	34.000.000.000,00	35.188.064.738,00	103,49	36.350.000.000,00	42.696.273.188,00	117,46
	- Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	395.016.510,00	5.452.260,00	1,38
	Jumlah PAD	103.453.707.669,93	115.509.509.302,20	111,65	120.449.593.706,00	121.905.955.657,39	101,21
5.	PENDAPATAN TRANSFER	-	-	-	1.182.004.537.563,00	1.375.003.659.861,00	116,33
	- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	1.123.019.828.705,00	1.306.889.767.885,00	116,37
	- Dana Perimbangan	958.727.414.259,00	1.059.212.967.160,00	110,48	988.580.733.705,00	1.172.474.050.195,00	118,60
	- Bagi Hasil Pajak	145.504.165.288,00	130.522.695.657,00	89,70	187.099.242.523,00	265.377.700.335,00	141,83
	- Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	146.733.013.021,00	268.399.109.936,00	182,92	154.433.877.788,00	267.154.306.821,00	172,98
	- Dana Alokasi Umum (DAU)	490.342.499.000,00	487.550.827.000,00	99,43	479.384.508.000,00	479.384.508.000,00	100,00
	- Dana Alokasi Khusus (DAK)	176.147.736.950,00	172.740.334.567,00	98,07	167.663.105.394,00	160.557.535.039,00	95,76
	- Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	25.251.347.000,00	25.251.347.000,00	100,00
	- Dana Desa	-	-	-	109.187.748.000,00	109.164.370.690,00	99,98
	- Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	-	-	-	58.984.708.858,00	68.113.891.976,00	115,48
	- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	-	-	-	52.144.708.858,00	60.073.891.976,00	115,21
	- Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	-	-	6.840.000.000,00	8.040.000.000,00	117,54
6.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	240.232.744.470,00	246.645.405.618,11	102,67	43.483.350.000,00	44.085.833.746,00	101,39
	- Pendapatan Hibah	50.303.593.050,00	49.482.290.424,00	98,37	43.483.350.000,00	44.085.833.746,00	101,39
	- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	46.616.796.420,00	53.850.760.594,11	115,52	-	-	-
	- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	135.272.355.000,00	135.272.354.600,00	100,00	-	-	-
	- Bantuan Keuangan dari Provinsi	8.040.000.000,00	8.040.000.000,00	100,00	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	1.302.413.866.398,93	1.421.367.882.080,31	109,13	1.345.937.481.269,00	1.540.995.449.264,39	114,49

Data Laporan Penerimaan Tahun 2021 Un.Audit BPK RI

• Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan dan Penurunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Dana Perimbangan dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah

Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan dan Penurunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Dana Perimbangan dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain Yang Sah Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan dan Penurunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

NO.	JENIS PENERIMAAN	2021			ALASAN
		TARGET	REALISASI	% ~	
A.	PAJAK DAERAH	36.121.319.500,00	31.752.296.480,00	87,90	
1.	Pajak Hotel Hotel Melati Satu Losmen/Rumah Penginapan/Pesangrahan/ Rumah Kos	119.950.000,00 100.000.000,00 19.950.000,00	185.104.100,00 177.284.100,00 7.820.000,00	154,32 177,28 39,20	Realisasi Pajak Hotel Terjadi Peningkatan/Over Target sebesar 54,32% disebabkan Tingkat Hunian Hotel Mulai Ramai dari Tamu yang menggunakan Jasa Penginapan/Hotel, disebabkan Sudah Meredanya Pandemi Covid 19 di Kab. Tanjung Jabung Barat Khususnya dan Provinsi Jambi pada umumnya.
2.	Pajak Restoran Rumah Makan Kantin / Warung kopi / Kopi	3.620.000.000,00 2.770.000.000,00 850.000.000,00	4.131.923.262,00 3.314.931.274,00 816.991.988,00	114,14 119,67 96,12	Terjadi peningkatan / Over target sebesar 14,14% Terjadi peningkatan pembayaran pajak catering oleh PT. Patra SS atas kontrak makan minum Petrochina Inter National Jabung Ltd dan pembayaran Pajak Makan Minum OPD dan Instansi lainnya.
3.	Pajak Hiburan Permainan Bilyard Pusat Kebugaran (Fitness Center) Penyelenggaraan Hiburan Insidental	11.840.000,00 - 850.000,00 10.990.000,00	3.594.500,00 - 3.494.500,00 100.000,00	30,36 - 411,12 0,91	Realisasi pajak hiburan berkurang 69,64% disebabkan: 1. Hiburan permainan Bilyard tutup. 2. Hiburan penyelenggaraan fitness terjadi peningkatan disebabkan antusias masyarakat untuk meningkatkan imun tubuh, sehingga mencegah terhadap Covid 19. 3. Penyelenggaraan Kesenian/Musik/Tari/Busana di musim pandemi penyelenggaraannya tidak dilaksanakan, dan banyak yang ditutup.
4.	Pajak Reklame Reklame Papan/Bill Board/Videocon/Megatron Reklame Kain/Spanduk	436.000.000,00 400.000.000,00 36.000.000,00	354.084.745,00 300.702.553,00 53.382.192,00	81,21 75,18 148,28	Terjadi penurunan sebesar 18,79% disebabkan 1. Adanya toko-loko yang tutup akibat dampak pandemic Covid 19 2. Belum Normalnya perekonomian Masyarakat terutama para pedagang manisan. 3. Kurangnya kegiatan perijinan sehingga keterlambatan pembayaran pajak atas usaha yang akan didirikan berkurang yang penyelenggaraannya oleh Dinas PDMP TSP Kab. Tanjung Jabung Barat (baik usaha yang berskala kecil maupun berskala besar)

5.	Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan PLN Pajak Penerangan Jalan Non PLN	18.125.239.000,00 13.025.239.000,00 5.100.000.000,00	18.078.230.466,00 13.871.671.260,00 4.206.559.206,00	99,74 106,50 82,48	Realisasi Pajak PPJ berkurang sebesar 0,23% diakibatkan Setoran PPJ Non PLN atas nama Petro China International Jabung Ltd untuk Trivulan III (Bulan Juli, Agustus dan September) belum disetor sampai akhir Desember 2021
6.	Pajak Parkir	20.900.000,00	30.566.400,00	146,25	Terjadi peningkatan/ over target sebesar 46,25% disebabkan terjadinya peningkatan penggunaan parkir di MM, Fresh, Indomart, Alfamart, dan Bank-Bank yang ada di wilayah Kab. Tanjung Barat
7.	Pajak Air Bawah Tanah	63.000.000,00	21.111.566,00	33,51	Realisasi Pajak Air Bawah Tanah berkurang sebesar 66,51% disebabkan oleh banyaknya pelanggan ABT yang beralih menggunakan PDAM (sehingga Pelanggan Sumur Bor banyak yang beralih) Dasar pengalihan untuk perusahaan gas dan minyak menunggu NPA (Nilai Perolehan Air) yang diterbitkan oleh Gubernur dan ditindak lanjuti dengan perubahan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat, serta menunggu perubahan Peraturan Menteri ESDM.
8.	Pajak Sarang Burung Walet	200.000.000,00	115.044.800,00	57,52	Realisasi Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet berkurang sebesar 42,48% disebabkan oleh: 1. Berkurangnya populasi burung walet khususnya di wilayah Kec. Tungkal ilir, Bram ilam, dan Belara sehingga dampak hasil Sarang Burung Walet berkurang. 2. Penangkaran Sarang Burung Walet banyak berubah fungsi. 3. Banyak pemilik usaha Sarang Burung Walet berada di luar Daerah
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pasir Tanah Liat Kerikil Batu Split Tanah Urug Tanah Laterik	1.524.390.500,00 135.000.000,00 1.300.000,00 170.300.000,00 406.000.000,00 703.000.000,00 108.790.500,00	1.584.866.425,00 14.620.750,00 77.500,00 154.500,00 1.120.960.575,00 446.841.100,00 2.212.000,00	103,97 10,83 5,96 0,09 276,10 63,56 2,03	Terjadi peningkatan sebesar 3,97% disebabkan Pengambilan dan Penambangan Sumber Daya Alam berupa Penambangan Tanah Urug. Penambangan Batuan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meningkat. Terjadinya Penambangan Batu Andesit, Batu Split/Batu olahan yang meningkat.
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Perdesaan Perkotaan	5.500.000.000,00 2.500.000.000,00 3.000.000.000,00	4.640.360.253,00 3.757.457.973,00 882.902.280,00	84,37 150,30 29,43	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan berkurang sebesar 16,68% disebabkan 1. Adanya data tidak valid 2. Objek Pajak tidak ditemukan 3. SPPT Ganda
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.500.000.000,00	2.607.409.963,00	40,11	Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Mengalami Penurunan sebesar 59,89% di sebabkan 1. Tidak adanya proses pembayaran Pajak BPHTB bagi perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kab. Tanjung Jabung Barat 2. Tidak adanya pengalihan lahan antara Masyarakat dengan pihak perusahaan

B.	RETRIBUSI DAERAH	3.430.808.796,00	2.566.363.152,00	74,80	
12.	Retribusi Jasa Umum	1.740.708.796,00	1.228.027.533,00	70,55	
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	700.708.796,00	605.752.653,00	86,45	-
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	120.000.000,00	93.180.000,00	77,65	OPD Dinas Lingkungan Hidup
	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	200.000.000,00	51.722.000,00	25,86	OPD Dinas Perhubungan
	Retribusi Pelayanan Pasar	65.000.000,00	69.442.000,00	106,83	OPD Dinas Perdagangan dan Koperasi
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	155.000.000,00	-	-	OPD Dinas Perhubungan
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000,00	407.930.880,00	81,59	OPD Dinas Komunikasi
13.	Retribusi Jasa Usaha	788.600.000,00	781.882.200,00	99,15	
	Retribusi Penaklukan Kekayaan Daerah	472.500.000,00	361.980.000,00	76,61	OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	- Sewa Alat-Alat Berat (Dinas PU)	150.000.000,00	159.400.000,00	106,27	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
	- Sewa Gedung / Aula dan Asrama	60.000.000,00	11.550.000,00	19,25	OPD Sekretariat Daerah
	- Sewa Gedung Eks Serbaguna	20.000.000,00	500.000,00	2,50	-
	- Sewa Water Front City (WFC)	-	-	-	-
	- Sewa GOR Bulutangkis	-	-	-	-
	- Sewa Mess Pemda Tanjung Barat di Jambi	35.000.000,00	24.780.000,00	70,80	OPD Sekretariat Daerah
	- Sewa Alat-Alat Berat (Dinas Perikanan)	75.000.000,00	-	-	OPD Dinas Perikanan
	- Sewa Kendaraan Dinas Bus	35.000.000,00	15.750.000,00	45,00	OPD Sekretariat Daerah
	- Pemakaian Kekayaan Pemda (Tanah Pemda)	97.500.000,00	150.000.000,00	153,85	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
	- Retribusi Pelayanan Ke Pelabuhan	204.000.000,00	332.130.200,00	162,81	OPD Dinas Perhubungan
	- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	22.100.000,00	3.600.000,00	16,29	OPD Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	-	-	-	-
	Retribusi Terminal	90.000.000,00	84.172.000,00	93,52	OPD Dinas Perhubungan
	- Peron	-	-	-	-
	- Bus Kecil (Angkutan Umum dengan Penumpang 1 s.d 8 Orang)	-	-	-	-
	- Angkutan Barang Pick Up	-	-	-	-
	- Angkutan Barang Truck Engkel	-	-	-	-
	- Angkutan Barang Truk Besar	-	-	-	-
	- Angkutan Pedesaan (Bus Kecil)	-	-	-	-
	- Retribusi Jasa Tempot / Ruangan	-	-	-	-
	Retribusi Khusus Parkir	-	-	-	-
14.	Retribusi Perizinan Tertentu	901.500.000,00	556.453.419,00	61,73	
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	300.000.000,00	124.031.719,00	41,34	OPD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Retribusi Gangguan / HO	-	-	-	-
	Retribusi Izin Trayek	-	-	-	-
	Retribusi Izin Usaha Perikanan	1.500.000,00	-	-	OPD Dinas Perikanan
	Retribusi Perpanjangan IMTA	600.000.000,00	432.421.700,00	72,07	OPD Dinas Tenaga Kerja

C.	HASIL PENGELOLA KEKAYAAN DAERAH YANG DI PISAHKAN	13.238.139.900,00	10.719.917.975,00	80,98	
15.	Bank Jambi (Deviden)	11.732.139.900,00	9.638.772.829,50	82,16	
16.	Bank Perkreditian Rakyat (BPR) Tanggo Rajo	1.506.000.000,00	1.081.145.146,00	71,79	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
D.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	67.659.325.510,00	76.867.378.049,89	113,61	
17.	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Di Pisahkan	393.000.000,00	517.783.060,00	131,75	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
18.	Penerimaan Jasa Giro	700.000.000,00	2.075.367.698,41	296,48	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
19.	Pendapatan Bunga Deposito	12.550.000.000,00	12.601.452.027,92	100,41	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
20.	Kerugian Barang Daerah	-	4.516.000,00	-	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
21.	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	119.174.666,26	-	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
22.	Pendapatan Denda Pajak	10.000.000,00	407.976,00	4,08	OPD Badan Pendapatan Daerah
23.	Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-	
24.	Pendapatan Dari Pengembalian	5.810.000.000,00	7.854.143.298,30	135,18	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
25.	Pendapatan BLUD Pada FKTP	957.109.000,00	1.029.188.000,00	107,53	OPD Dinas Kesehatan
26.	Pendapatan Kapitasi pada FKTP	10.494.200.000,00	9.963.619.875,00	94,94	
27.	Pendapatan BLUD Rumah Sakit	36.350.000.000,00	42.696.273.188,00	117,46	OPD Dinas Kesehatan
28.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	395.016.510,00	5.452.260,00	1,38	

Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan dan Penurunan Terhadap Penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2021

No.	Jenis Penerimaan	2021			Alasan
		Target	Realisasi	%	
1.	PENDAPATAN TRANSFER	1.182.004.537.563,00	1.375.003.659.861,00	116,33	
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAHAN PUSAT	1.123.019.828.705,00	1.306.889.767.885,00	116,37	
	Dana Perimbangan	988.580.733.705,00	1.172.474.050.195,00	118,60	
1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	341.533.120.311,00	532.532.007.156,00	155,92	Terdapatnya surplus Penerimaan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak diakibatkan dari direalisasinya penyelesaian Kurang Tahun 2020 secara keseluruhan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 129/2021 sementara untuk Penyaluran Triwulan I s/d IV Tahun 2021 sesuai dengan Kebijakan Pemerintahan telah disalurkan penuh sesuai dengan yang tercantum dalam Perpres 113 Thun 2020.
	Bagi Hasil Pajak	187.099.242.523,00	265.377.700.335,00	141,83	
	a. Perkebunan	10.775.640.244,00	15.503.945.733,00	143,88	
	b. Perhutanan	8.622.608.755,00	12.130.113.830,00	140,68	
	c. Migas	150.522.290.496,00	216.120.664.779,00	143,58	
	d. Bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Daerah	4.333.018.317,00	5.943.499.482,00	137,17	
	e. BP PBB	5.355.776.737,00	7.575.998.125,00	141,45	
	f. Non Migas	5.994.556,00	19.209.573,00	320,45	
	g. Sektor lainnya	156.065.418,00	363.060.125,00	232,63	
	h. PPh 21	6.999.212.800,00	7.210.045.961,00	103,01	
	i. PPh 25 & 29	328.635.200,00	511.162.727,00	155,54	
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA	154.433.877.788,00	267.154.306.821,00	172,99	Terdapatnya surplus Penerimaan dari Dana Bagi Hasil bukan Pajak (SDA) diakibatkan dari direalisasinya penyelesaian sisa Kurang bayar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 129/pmk.07/2021, sementara untuk penyaluran Reguler Triwulan I s/d IV Tahun 2021 sesuai dengan kebijakan Pemerintah telah disalurkan penuh sesuai dengan yang tercantum dalam Perpres 113 Tahun 2020
	a. Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusaha Hutan (IHUPH)	-	-	-	
	b. Bagi Hasil dari SDA PSDH	10.606.231.737,00	14.302.143.835,00	134,85	
	c. Bagi Hasil dari Dana Reboisasi (DR)	-	-	-	
	d. Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	58.443.525,00	58.443.525,00	100,00	
	e. Bagi Hasil dari Eksplorasi dan Iuran Exploitas (Royalti)	6.861.566.300,00	8.805.468.700,00	128,33	
	f. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.674.500.150,00	1.674.500.150,00	100,00	
	g. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	90.527.893.800,00	108.251.593.929,00	119,58	
	h. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	44.636.728.200,00	134.034.146.484,00	300,28	
	i. Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	68.514.076,00	28.010.198,00	40,88	
3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	479.384.508.000,00	479.384.508.000,00	100,00	Pelaksanaan Transfer telah sesuai dengan Perpres 113/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 139/2019.
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	167.663.105.394,00	160.557.535.039,00	95,76	Evaluasi dan pelaporan DAK Fisik terdapat di BKAD Kab. Tanjab Barat. Evaluasi dan pelaporan DAK Non Fisik terdapat di BKAD Kab. Tanjab Barat.
	a. DAK Fisik	74.811.793.000,00	72.431.493.231,00	96,82	
	b. DAK Non Fisik	92.851.312.394,00	88.126.041.808,00	94,91	

No.	Jenis Penerimaan	2021			Alasan
		Target	Realisasi	%	
5.	Dana Insentif Daerah (DID)	23.251.347.000,00	25.251.347.000,00	100,00	Pelaksanaan Transfer Dana Desa telah sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres 113/2020 dan PMK No. 139/2019.
	Dana Desa	109.187.748.000,00	109.164.370.690,00	99,98	Pelaksanaan Transfer Dana Desa telah sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres 113/2020 dan PMK No. 139/2019.
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAHAN DAERAH	58.984.708.858,00	68.113.891.976,00	115,48	
1.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	52.144.708.858,00	60.073.891.976,00	115,21	Pelaksanaan Transfer telah sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam APBD 2021 dan sesuai dengan Perda 11/2011 tentang pajak Daerah dan Pergub 23/2017 tentang tata cara Pembagian hasil penerimaan pajak pemerintah Provinsi dan terdapatnya surplus pendapatan diakibatkan dari keterlambatan dalam menyesuaikan Target Pendapatan pada APBD-P 2021 hal tersebut disebabkan juga dari keterlambatan Provinsi dalam menyampaikan Perubahan Taarjet Penerimaan DBH Pajak ke Kabupaten/Kota untuk APBD Perubahan sebagaimana surat BAKAEUDA Nomor
	a. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	11.646.628.436,00	12.625.440.442,00	108,40	
	b. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.849.437.764,00	9.103.611.595,00	155,63	
	c. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.339.715.434,00	24.070.032.381,00	118,34	
	d. Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	150.828.807,00	198.728.543,00	131,76	
	e. Bagi Hasil dari Pajak Rokok	14.158.098.417,00	14.076.079.015,00	99,42	
2.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	6.840.000.000,00	8.040.000.000,00	117,54	
	a. Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Desa dan Kelurahan	6.840.000.000,00	8.040.000.000,00	117,54	
	b. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Alat Berat dan/atau Pendukung Lainnya	-	-	-	

Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan/Penurunan Target Terhadap Penerimaan Pendapatan Lain-lain Yang Sah Tahun 2021

No.	Jenis Penerimaan	2021			Alasan
		Target	Realisasi	%	
I.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	43.483.350.000,00	44.085.833.746,00	101,39	
1.	Pendapatan Hibah	43.483.350.000,00	44.085.833.746,00	101,39	Evaluasi dan pelaporan Dana Bos terdapat di Dinas Pendidikan Kab. Tanjab Barat Terjadi Over Target Pada Pedapatan Hibah Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP Sebesar Rp. 602.483.746.
	a. BOS SD	32.274.990.000,00	-	-	
	b. BOS SMP	11.208.360.000,00	-	-	
	c. BOS Afirmasi	-	-	-	
	d. BOS Kinerja	-	-	-	

❖ **Perkembangan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020-2021 terus mengalami peningkatan, dari tabel Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020-2021 diatas dapat kita lihat bahwa Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Rp.1.421.367.882.080,31, Tahun 2021 Rp.1.540.995.449.264,39. Jumlah tersebut merupakan Akumulasi dari jumlah penerimaan pendapatan asli daerah ditambah Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Perkembangan Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah pada Tahun 2020-2021 cukup Signifikan, Realisasi PAD Tahun 2020 Sebesar Rp. 115.509.509.302,20 , Realisasi Penerimaan Daerah Tahun 2020 Sebesar Rp.1.421.367.882.080,31 dan Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Sebesar 8,13% Sedangkan Untuk Tahun 2021 Penerimaan Asli Daerah Sebesar Rp. 121.905.955.657,39 dan Target Pendapatan Daerah pada Renstra/RPJMD Rp. 1.247.761.849.420,00 dari Target 7,98% terealisasi sebesar 9,77% terjadi Peningkatan sebesar 1,64% dari Tahun Sebelumnya.

2. Pendapatan Transfer

Penerimaan Pendapatan Transfer Juga Mengalami Peningkatan dari Tahun 2020, Penerimaan Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) Tahun 2020 Sebesar Rp. 1.059.212.967.160,00 dari Target Rp. 958.727.414.259,00 atau 110,48% sedangkan Realisasi Tahun 2021 sebesar Rp. 1.375.003.659.861,00 dari Target Rp. 1.182.004.537.563,00 atau 116,33%.

Pendapatan Transfer Terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintahan Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintahan Daerah.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2021 yang Bersumber dari Pendapatan Hibah dari Dana Bos Mengalami Penurunan dari Tahun 2020 , Realisasi Pendapatan Dana Hibah Tahun 2020 Sebesar Rp. 49.482.290.424,00 dari Target Rp. 50.303.593.050,00 atau 98,37% Sedangkan Tahun 2021 dari Target Rp. 43.483.350.000,00 terealisasi Sebesar Rp. 44.085.833.746,00 atau 101,39%

4. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Yang Dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun	Realisasi		Jumlah	Kinerja (%)
	Pajak Daerah	Lain-lain PAD yang sah		
2020	30.877.935.493,00	1.372.530,00	30.879.308.023,00	-12,84
2021	31.752.296.480,00	407.976,00	31.752.704.456,00	2,82

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2020 - 2021 juga mengalami fluktuasi. Tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar -12,84%, ini disebabkan penerimaan dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Tidak Mencapai Target Akibat Dampak dari Pandemi Covid 19 sedangkan untuk Tahun 2021 Mulai Terjadi Peningkatan Sebesar 2,82%.

5. Perkembangan Kontribusi PAD dan PAD yang dikelola Badan Pendapatan Daerah terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kontribusi Penerimaan PAD yang dikelola Bapenda terhadap PAD Tahun 2020-2021.

Tahun	Realisasi Penerimaan Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah	Realisasi PAD yang dikelola Dipenda	Kontribusi PAD yang dikelola Bapenda terhadap Penerimaan Daerah	Kontribusi PAD yang dikelola Bapenda terhadap Penerimaan PAD
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)
2020	1.421.367.882.080,31	115.509.509.302,20	8,13	30.832.007.023,00	2,17	26,69
2021	1.540.995.449.264,39	121.905.955.657,39	7,91	31.752.704.456,00	2,06	26,05

Perkembangan Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2020-2021 berkisar antara 7% – 8%, sedangkan Perkembangan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2020-2021 hanya berkisar diatas 2%, untuk tahun 2021 berdasarkan Realisasi Penerimaan Daerah untuk kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah Sebesar 7,91%, sedangkan untuk kontribusi PAD yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah terhadap Penerimaan Daerah Sebesar 2,06% dan Kontribusi PAD yang dikelola Bapenda terhadap Penerimaan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 26,05%.

3. Capaian Kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dan Rpjmd Menurut Urusan Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026

Capaian kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2021 sampai dengan 2026, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran PAD						Realisasi Kinerja Sasaran PAD						Capaian Kinerja Sasaran PAD					
			Tahun I 2021	Tahun II 2022	Tahun III 2023	Tahun IV 2024	Tahun V 2025	Tahun VI 2026	Tahun I 2021	Tahun II 2022	Tahun III 2023	Tahun IV 2024	Tahun V 2025	Tahun VI 2026	Tahun I 2021	Tahun II 2022	Tahun III 2023	Tahun IV 2024	Tahun V 2025	Tahun VI 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	7,98%	8,06%	8,12%	8,16%	8,18%	8,18%	9,77	-	-	-	-	-	122,43	-	-	-	-	-
		- Persentase capaian penerimaan PBB dan BPHTB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60,40	-	-	-	-	-	60,40	-	-	-	-	-
		- Persentase capaian penerimaan pajak lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	101,59	-	-	-	-	-	101,59	-	-	-	-	-
		- Jumlah pelaporan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
		- Jumlah Sosialisasi dan penyuluhan yang dilaksanakan	3 Kali	8 Kali	10 Kali	10 Kali	6 Kali	10 Kali	3 Kali	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
		- Jumlah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran PAD						Realisasi Kinerja Sasaran PAD						Capaian Kinerja Sasaran PAD					
			Tahun I 2021	Tahun II 2022	Tahun III 2023	Tahun IV 2024	Tahun V 2025	Tahun VI 2026	Tahun I 2021	Tahun II 2022	Tahun III 2023	Tahun IV 2024	Tahun V 2025	Tahun VI 2026	Tahun I 2021	Tahun II 2022	Tahun III 2023	Tahun IV 2024	Tahun V 2025	Tahun VI 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		- Jumlah aplikasi yang dikelola	5 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	5 Aplikasi	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
2		Indeks Kepuasan Masyarakat	78,24%	79,00%	80,00%	81,00%	82,00%	83,00%	78,88%	-	-	-	-	-	100,81	-	-	-	-	-
		Nilai AKIP	68,99%	69,00%	69,25%	68,50%	68,75%	70,00%	60,85%	-	-	-	-	-	88,20	-	-	-	-	-
		- Persentase pemenuhan komponen IKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
		- Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
		- Persentase pemenuhan komponen SAKIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-

Evaluasi terhadap Capaian RPJMD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	7,98%	9,77%	8,06%		8,12%		8,16%		8,18%		8,18%		8,18%		BAPENDA
Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	6,95%	7,91%	7,00%		7,07%		7,27%		7,68%		8,42%		8,42%		BAPENDA
Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah															BAPENDA
a. Pajak Daerah	11	11	11		11		11		11		11		11		BAPENDA
b. Retribusi Daerah	3	3	3		3		3		3		3		3		BAPENDA

Sebagaimana tabel diatas dapat kami jabarkan bahwa Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah yang dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari target 7,98% terealisasi sebesar 9,77% , Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah dari Target 6,95% terealisasi 7,91%, dengan 11 Jenis Pajak Daerah dan 3 Jenis Retribusi Daerah.

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

➤ Sumber Daya Aparatur

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 125 Orang, terdiri dari PNS/CPNS sebanyak 47 Orang dan Tenaga Kontrak/Honoror sebanyak 78 Orang. Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada sebagai berikut :

No	Pegawai	Jumlah (orang)	%
1.	Pegawai Negeri Sipil/CPNS	48	37,00
2.	TKS/TKK	82	63,00
	Jumlah	130	100,00

Dari jumlah pegawai tersebut diatas, dapat di klarifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel a dan tabel b di bawah ini:

Tabel a – Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Gol	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah	%
II	10	-	-	-	10	8,00
III	34	-	-	-	34	26,00
IV	4	-	-	-	4	3,00
Tenaga Kontrak	-	-	-	82	82	63,00

Total	48	-	-	82	130	100,00
--------------	-----------	----------	----------	-----------	------------	---------------

Tabel b – Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah	%
Laki-laki	23	-	-	42	65	50,00
Perempuan	25	-	-	40	65	50,00
Total	48	-	-	82	130	100,00

Sedangkan penugasannya ke sub unit sebagai berikut:

- 1) Sekretariat : 45 Orang
- 2) Bidang PBB-P2 dan BPHTB : 29 Orang
- 3) Bidang Pajak Daerah : 22 Orang
- 4) Bidang Pengendalian dan Pelaporan : 17 Orang
- 5) Bidang Pengembangan dan Pendapatan Daerah : 17 Orang

Jumlah Pegawai berdasarkan jabatannya:

- 1) Eselon II B (Kepala Dinas) : 0 Orang
- 2) Eselon III A (Sekretaris) : 1 Orang
- 3) Eselon III B (Kepala Bidang) : 4 Orang
- 4) Eselon IV (Kasubbag/Kasi) : 14 Orang
- 5) Pelaksana : 111 Orang

Sedangkan klasifikasi berdasarkan pendidikan dan program study pegawai adalah sebagai berikut (tabel c dan tabel d)

Tabel c – Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah	%
Strata-2 (S2)	2	-	-	-	2	1,50
Strata-1 (S1)	30	-	-	38	68	52,00
Sarjana Muda/D3	4	-	-	1	5	4,00
SLTA/SMK	12	-	-	42	54	41,50
SD	-	-	-	1	1	1,00
Total	48	-	-	82	130	100,00

Tabel d – Jumlah Pegawai berdasarkan Strata Pendidikan

Strata Pendidikan	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah	%
Magister						
1. Magister Ekonomi	1	-	-	-	1	0,77
2. Magister Sosial Politik	1	-	-	-	1	0,77
Sarjana						
1. Ilmu Sains/Biologi	-	-	-	1	1	0,77
2. Ilmu Sosial	1	-	-	4	5	3,85
3. Ilmu Hukum	3	-	-	6	9	6,92
4. Ilmu Ekonomi	16	-	-	17	33	25,38
5. Ilmu Pendidikan	-	-	-	4	4	3,08
6. Ilmu Administrasi Manajemen Publik	4	-	-	-	4	3,08
7. Ilmu Administrasi Negara	1	-	-	-	1	0,77
8. Ilmu Administrasi Perpajakan	2	-	-	-	2	1,54
9. Pertanian	1	-	-	-	1	0,77
10. Peternakan	-	-	-	-	-	-
11. Komputer/Informatika	1	-	-	2	3	2,31
12. Ilmu Komunikasi	1	-	-	2	3	2,31
13. Kesehatan	-	-	-	2	2	1,54
Sarjana Muda						
1. Manajemen Informatika	1	-	-	1	2	1,54
2. Ekonomi	3	-	-	-	3	2,31
Menengah Kejuruan	7	-	-	7	14	10,77
Menengah Atas	5	-	-	35	40	30,77
Sekolah Dasar	-	-	-	1	1	0,77
Total	48	-		82	130	100

Kegiatan yang dilaksanakan di bidang kepegawaian adalah :

- 1) Membuat daftar nominatif, bazzeting dan daftar urutan kepangkatan pegawai (DUK), LP2P, membuat usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pensiun, buku induk pegawai.
- 2) Pengembangan pegawai.
- 3) Mengelola daftar hadir.
- 4) Pembinaan pegawai.
- 5) Koordinasi pembuatan DP3.
- 6) Kesejahteraan pegawai.
- 7) Penilaian Angka Kredit jabatan fungsional.

Adapun jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan adalah sebagaimana tabel e berikut ini:

Tabel e – Jumlah Pegawai yang mengikuti penjenjangan

Jabatan/Staf	Jumlah	%
Spama/Diklat PIM III	2	20
Adun/Adumla/Diklat	8	80
Total	10	100

➤ Sarana Prasarana

Pada saat ini Kantor Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat berlokasi di Jl. Beringin Kuala Tungkal. Berdasarkan Rekapitulasi Barang ke Neraca per 31 Desember 2021 Sarana dan Prasarana yang dimiliki saat ini oleh Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

Neraca Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Per 31 Desember 2021

Uraian	2021
ASET	17.960.961.910,58
ASET LANCAR	2.186.535.527,58
Piutang Pendapatan	7.985.327.557,50
Piutang Pajak Daerah	7.985.327.557,50
Penyisihan Piutang	(6.254.203.233,84)
Penyisihan Piutang Pendapatan	(6.254.203.233,84)
Beban dibayar di muka	3.503.833,92
Beban Jasa dibayar di muka	3.503.833,92
Persediaan	451.907.370,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	152.854.750,00
Persediaan Barang Lainnya	299.052.620,00
ASET TETAP	15.690.251.383,00
Peralatan dan Mesin	10.794.374.651,47
Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	2.128.271.500,00
Alat Ukur	89.100.000,00
Alat Kantor	2.299.706.472,47
Alat Rumah Tangga	1.835.433.873,00
Komputer	3.439.254.306,00
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	162.364.500,00
Alat Studio	541.239.000,00
Alat Komunikasi	3.490.000,00
Peralatan Pemancar	295.515.000,00
Gedung dan Bangunan	16.675.344.852,53
Bangunan Gedung Tempat Kerja	16.675.344.852,53
Jalan, Irigasi dan Jaringan	64.760.000,00

Uraian	2021
Bangunan Air (Irigasi)	64.760.000,00
Kontruksi dalam pengerjaan	8.943.000,00
Kontruksi dalam pengerjaan	8.943.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(11.853.171.121,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.482.560.168,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.351.182.957,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi Jaringan	(19.427.996,00)
ASET LAINNYA	84.175.000,00
Aset Tidak Berwujud	84.175.000,00
Aset Tak Berwujud lainnya	837.300.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(753.125.000,00)
Aset lain-lain	28.150.000,00
Akumulasi Penyusutan aset lain-lain	(28.150.000,00)
JUMLAH ASET	17.960.961.910,58
KEWAJIBAN	274.545.980,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	274.545.980,00
Pendapatan Diterima Dimuka	67.495.980,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya	67.495.980,00
Utang Belanja	207.050.000,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	207.050.000,00
JUMLAH KEWAJIBAN	274.545.980,00
EKUITAS	17.686.415.930,58
EKUITAS	17.686.415.930,58
Ekuitas	17.686.415.930,58
JUMLAH EKUITAS	17.686.415.930,58
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	17.960.961.910,58

➤ **Pendanaan**

Jumlah belanja yang dianggarkan pada DPA Perubahan Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 sebesar Rp. 11.970.189.835 terealisasi Rp. 10.337.129.773 atau 86,36% yang terdiri dari :

1. Belanja Operasional dari anggaran Rp. 11.756.278.998 terealisasi Rp. 10.790.479.679 atau 95,47% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 512.483.594 atau 4,53%.
2. Belanja Modal dari anggaran Rp. 213.910.908 terealisasi Rp. 207.050.000 atau 96,79% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 6.860.908

5. Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam menjalankan fungsinya untuk menunjang pencapaian target pada pernyataan perjanjian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 melaksanakan 2 program dan 8 kegiatan dengan jumlah Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

**Jumlah Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran pada Program
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2021**

No	Program	Anggaran		Realisasi	
		Jumlah	Proporsi (%)	Keuangan	
				Jumlah	%
PROGRAM PENDUKUNG					
1.	Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.630.906.986	80,46	8.108.897.423	84,20
PROGRAM UTAMA					
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.339.282.849	19,54	2.228.232.350	95,25
JUMLAH 2021		11.970.189.835	100	10.337.129.773	86,36

Dari tabel diatas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan 2 Program Pendukung dan 1 Program Utama. Program Pendukung dengan penyerapan anggaran 84,20% sebagai efisiensi

anggaran Program Utama yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah setelah APBDP Tahun 2021 Penyerapan Anggaran sebesar 95,25% .

Dalam upaya pencapaian target Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menetapkan Indikator dan Target Kinerja Kepala Bidang yang dijadikan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang terhadap Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (PK) Eselon III antara lain:

1. Bidang Pajak Daerah

Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Bidang Pajak Daerah Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu:

- Persentase Capaian Penerimaan Pajak Lainnya dengan Target 100% Bidang Pajak Daerah mengelola 9 Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Parkir. Realisasi jumlah penerimaan 9 Pajak Daerah yang dikelola oleh Bidang Pajak Daerah Tahun 2021 sebesar Rp. 24.504.526.264 Dari Target sebesar Rp. 24.121.319.520 (101.59%) .Pajak Daerah yang Realisasinya tidak mencapai 100% antara lain :

- Pajak Hiburan, ini disebabkan penyelenggaraan hiburan permainan bilyard ditutup dan Penyelenggaraan Kesenian/Musik/Tari/Busana di musim pandemic penyelenggaraannya tidak dilaksanakan dan banyak yang tutup.
- Pajak Reklame disebabkan adanya Toko-Toko yang tutup Akibat dampak Pandemi Covid 19, Belum Normalnya Perekonomian Masyarakat Terutama para Pedagang Manisan dan Kurangnya Kegiatan Perizinan sehingga keterkaitan Pembayaran Pajak atas Usaha yang akan didirikan berkurang yang Penyelenggaraannya oleh Dinas PDMPTSP Kab.Tanjung Jabung Barat (Baik Usaha yang Berskala Kecil maupun Berskala Besar).

- Pajak Air Bawah Tanah, ini disebabkan Banyaknya Pelanggan Air Bawah Tanah yang beralih menggunakan PDAM (sehingga Pelanggan Sumur Bor Banyak yang Beralih), dasar penagihan untuk perusahaan gas dan minyak menunggu NPA (Nilai Perolehan Air) yang diterbitkan oleh Gubernur dan ditindak lanjuti dengan perubahan peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat serta menunggu perubahan peraturan Menteri ESDM.
- Pajak Sarang Burung Walet, ini disebabkan berkurangnya populasi burung walet khususnya di wilayah Kecamatan Tungkal Ilir, Bram Itam dan Betara sehingga dampak hasil Sarang Burung Walet Berkurang, Penangkaran Sarang Burung Walet banyak berubah fungsi dan Banyaknya Pemilik Usaha Sarang Burung Walet berada di luar Daerah.

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator pada Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	• Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan	7,98%	9,77%	122,43%	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		120.000.000.000	121.905.955.657,39	101,59%	
			Persentase realisasi penerimaan 9 pajak daerah	100% 24.121.319.500	101,59% 24.504.526.264	101,59%	
	• Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah SSPD yang ditagih	10441 SSPD	11613 SSPD	111,22%	
			Jumlah Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	16 Kali	16 Kali	100%	

		Jumlah SPTPD/SKPD yang diterbitkan dan disampaikan kepada WPD	10441 SPTPD/SKPD	11564 SPTPD/SKPD	110,76%	
		Jumlah Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah	7450 OP/WP	7949 OP/WP	106,70%	
	▪ Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Pengendalian Pajak Daerah	20 OP/WP	20 OP/WP	100,00%	

2. Bidang PBB-P2 dan BPHTB

Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Bidang PBB-P2 dan BPHTB Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Persentase Capaian Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB dengan target 100%. Jumlah realisasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB Tahun 2021 sebesar Rp. 7.247.770.216 dari Target sebesar Rp. 12.000.000.000 .

Penyebab Tidak tercapainya Target Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB antara lain Karena PBB-P2 ada Data yang Tidak Valid, Objek Tidak ditemukan dan terdapat SPPT Ganda. Sedangkan untuk Pajak BPHTB Karena tidak adanya proses pembayaran Pajak bagi perusahaan-perusahaan besar dan tidak adanya pengalihan lahan antara Masyarakat dengan pihak Perusahaan.

Program kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator Kinerja pada Bidang PBB –P2 dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan	7,98%	9,77%	122,43 %	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		120.000.000.000	121.905.955.657,39	101,59%	
			Realisasi Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	12.000.000.000	7.247.770.216	60,40%	
			PBB-P2	5.500.000.000	4.640.360.253	84,37%	
			BPHTB	6.500.000.000	2.607.409.963	40,11%	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2 yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	100%	
			Jumlah data wajib pajak PBB P2	7000 OP	3838 OP	54,83%	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah Data Objek dan Subjek BPHTB yang diverifikasi	450 OP	1243 OP	276,22%	
			Jumlah Penyampaian SPPT dan Penagihan PBB P2	105000 SPPT	85427 SPPT	81,36%	
			Jumlah Pelayanan Mobil Keliling PBB P2	88 Kali	-	0%	
			Jumlah Penerbit SPPT PBB P2	105000 SPPT	110777 SPPT	105,50%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
			BPHTB	450 OP	1243 OP	276,22%	
			Jumlah Penetapan dan Pencetakan SPPT PBB-P2	105000 SPPT	110777	105,50%	

Sehubungan dengan adanya pandemi Covid 19 ada beberapa target Indikator Kinerja kegiatan tidak tercapai antara lain :

1. Evaluasi Penerimaan PBB P2 dengan capaian 84,37% ,tidak tercapainya target karena kesadaran masyarakat untuk membayar PBB-P2 masih kurang dan tidak dapat melakukan penyuluhan secara optimal sehubungan dengan adanya covid 19
2. Penyampaian dan penagihan PBB P2 dengan capaian 81,36% disebabkan SPPT ada yang dikembalikan/ dibatalkan akibat ganda dan OP/WP tidak ditemukan
3. Pelayanan Mobil Keliling PBB-P2 tidak dapat dilaksanakan disebabkan tidak Tersedianya anggaran, maka pelayanan mobil keliling tidak maksimal dilaksanakan untuk penyetoran PBB-P2 di kecamatan dilakukan secara kolektif oleh para lurah dan kades melalui Bank atau ke Bapenda kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Bidang Pengendalian dan Pelaporan

Untuk mendapatkan laporan penerimaan daerah yang valid Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai koordinator di Bidang Pendapatan Daerah setiap awal bulan melakukan rekonsiliasi dengan 16 SKPD, Lembaga/Instansi terkait baik dari pusat dan daerah serta stakeholder lainnya untuk mensinkronkan data penerimaan pada masing-masing pengelola pendapatan, sedangkan untuk pengendalian penerimaan pendapatan daerah, penerimaan dana transfer dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) namun sebagaimana salah satu tugas dan fungsi pada Bidang Pengendalian dan Pelaporan Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu pada Subbidang Dana Transfer antara lain melakukan penyusunan rencana petunjuk dan pelaksana teknis, monitoring dan evaluasi penerimaan dana transfer, pengumpulan data penyaluran dana transfer yang merupakan penerimaan daerah dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Capaian Indikator Kinerja Bidang Pengendalian dan Pelaporan yaitu Jumlah Laporan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Target 12 Laporan dilaksanakan melalui Program kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator Kinerja pada Bidang pengendalian dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	* Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan	7,98%	9,77%	122,43 %	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		120.000.000.000	121.905.955.657,39	101,59 %	
			Jumlah Pelaporan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 laporan	100%	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Penerimaan Pendapatan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
			Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Penerimaan	2 Kali	2 Kali	100%	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Dana Transfer	12 Laporan	12 Laporan	100%	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Jenis Pelayanan Benda Berharga	40 Jenis	40 Jenis	100%	
			Jumlah Laporan Penerimaan dan Pendapatan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100%	

4. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu:

- Jumlah Sosialisasi dan Penyuluhan yang di laksanakan dengan Target 3 Kali
- Jumlah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah dengan Target 1 Dokumen
- Jumlah Aplikasi yang dikelola dengan Target 5 Aplikasi.

Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi perencanaan pendapatan, pengkajian dan pengembangan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah di bidang pengembangan pendapatan daerah. Dalam melakukan tugas bidang pengembangan pendapatan daerah menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pengelolaan sistem informasi yang berbasis teknologi dan pelayanan pajak daerah, pengkajian potensi pendapatan serta penyuluhan dan promosi pajak daerah dan perkembangan penerimaan daerah, perhitungan potensi pajak daerah, sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah serta penyusunan draft regulasi PAD. Pada Tahun 2020 untuk layanan informasi pajak daerah yang muktahir dan akurat terealisasi 100% dengan tersedianya pengelolaan sistem informasi dan pelayanan pajak

daerah dengan memakai 6 Aplikasi antara lain : SISMIOP, BPHTB, SIMPEDA, SIMPAREDA, E-PAYMENT dan Web Bapenda.

Program kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator pada Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	•Meningkatny a Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan	7,98%	9,77%	122,43 %	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		120.000.000.000	121.905.955.657,39	101,59 %	
	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Produk Hukum Pajak Daerah Yang diterbitkan	3 Produk Hukum	3 Produk Hukum	100%	
			Jumlah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
			Jumlah Sistem Informasi Pajak Daerah yang dikelola	5 Aplikasi	5 Aplikasi	100%	
	Penyuluhan dan Penyebarluasa n Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Penyuluhan yang dilaksanakan	3 Kali	3Kali	100%	
			Jumlah Media Publikasi Pajak Daerah yang dikelola	4 Media	4 Media	100%	

5. Sekretariat

Sekretaris Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung sasaran 2 pada Perjanjian Kinerja Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Akip.

Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu:

- Persentase temuan audit pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan target 90%
- Persentase Pemenuhan Komponen IKM dengan target 100%
- Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP dengan target 100%

Program kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
I.	Perogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	IKM		78,24%	78,88%	100,81%	
		Nilai SAKIP		68,99%	60,85%	88,26%	
			Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	100%	100%	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dok	9 Dok	100%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan	8 Dok	8 Dok	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Realisasi Capaian Kinerja	12 Lap	12 Lap	100%	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang	49 Orang	100%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22 Orang	22 Orang	100%	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	100%	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	128 Stel	128 Stel	100%	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang -		Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan	4 Orang	4 Orang	100%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	Undangan		Teknis				
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Penyediaan Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	99,12%	99,12%	
	▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	375 Buah	375 buah	100%	
	▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4985 Buah	4985 Buah	100%	
	▪ Penyedia Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	914 Kotak	881 Kotak	96,39%	
	▪ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Bahan Cetakan dan Penggandaan	25416 Buah	98,33%	98,33%	
	▪ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan- Undangan		Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	1800 Eksempla r	1800 Eksempla r	100%	
	▪ Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 Bulan	100%	
5.	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	15 unit	15 unit	100%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
			Daerah				
	▪ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	12 Unit	100%	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	
	▪ Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	100%	
	▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%	
	▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Waktu Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181 Unit	181 Unit	100%	
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	1 Unit	1 Unit	100%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41 Unit	41 Unit	100%	
	▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Terpelihara	138 Unit	138 Unit	100%	
	▪ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1 Unit/450 M2	1 Unit/450 M2	100%	

B. REALISASI ANGGARAN

Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 dengan target Rp. 36.131.319.500 realisasi sebesar Rp. 31.752.704.456 atau 87,88%, sedangkan jumlah Belanja yang di anggarkan pada APBDP Bapenda Tahun 2021 sebesar Rp. 11.970.189.835 teralisasi Rp. 10.337.129.773 atau 86,38% dengan perincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%
1	2	3	4	5
4.	<u>PENDAPATAN - LRA</u>	36.131.319.500,00	31.752.704.456,00	87,88
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	36.131.319.500,00	31.752.704.456,00	87,88
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	36.121.319.500,00	31.752.296.480,00	87,90
4.1.1.06.	Pajak Hotel – LRA	119.950.000,00	185.104.100,00	154,32
4.1.1.07.	Pajak Restoran – LRA	3.620.000.000,00	4.131.923.262,00	114,14
4.1.1.08.	Pajak Hiburan – LRA	11.840.000,00	3.594.500,00	30,36
4.1.1.09.	Pajak Reklame – LRA	436.000.000,00	354.084.745,00	81,21
4.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan - LRA	18.125.239.000,00	18.078.230.466,00	99,74
4.1.1.11.	Pajak Parkir – LRA	20.900.000,00	30.566.400,00	146,25
4.1.1.12.	Pajak Air Tanah – LRA	63.000.000,00	21.111.566,00	33,51
4.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet – LRA	200.000.000,00	115.044.800,00	57,52
4.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA	1.524.390.500,00	1.584.866.425,00	103,97
4.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LRA	5.500.000.000,00	4.640.360.253,00	84,37
4.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA	6.500.000.000,00	2.607.409.963,00	40,11

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%
1	2	3	4	5
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah – LRA	10.000.000,00	407.976,00	4,08
4.1.4.12	Pendapatan Denda Pajak – LRA	10.000.000,00	407.976,00	4,08
5.	BELANJA	11.970.189.835,00	10.337.129.772,64	86,36
5.1.	BELANJA OPERASI	11.756.278.927,00	10.130.079.772,64	86,17
5.1.1.	Belanja Pegawai	7.457.419.421,00	6.297.360.440,00	84,44
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.351.319.031,00	3.079.695.563,00	91,90
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.026.164.416,00	1.797.441.805,00	88,71
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.176.902.987,00	866.785.884,47	73,65
5.1.1.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	903.032.987,00	553.437.187,67	61,29
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.298.859.506,00	3.832.719.332,50	89,16
5.1.2.01	Belanja Barang	1.299.579.006,00	1.167.208.100,00	89,81
5.1.2.02	Belanja Jasa	2.180.627.500,00	1.981.720.641,50	90,88
5.1.2.03.	Belanja Pemeliharaan	322.850.000,00	306.350.050,00	94,89
5.1.2.04.	Belanja Perjalanan Dinas	448.753.000,00	330.390.541,00	73,62

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%
1	2	3	4	5
5.1.2.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	47.050.000,00	47.050.000,00	100,00
5.2	BELANJA MODAL	213.910.908,00	207.050.000,00	96,79
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	213.910.908,00	207.050.000,00	96,79
5.2.2.10.	Belanja Modal Komputer	213.910.908,00	207.050.000,00	96,79
5.Z	SURPLUS/ (DEFISIT)	24.161.129.665,00	21.415.574.683,36	88,64

BAB IV

PENUTUP

Untuk Penerimaan Daerah Tahun 2021 dari target Rp. 1.345.937.481.269,00 terealisasi sebesar Rp. 1.540.995.449.264,39 atau 114,49%, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari target Rp. 120.449.593.706,00 terealisasi sebesar Rp. 121.905.955.657,39 atau 101,21%, sedangkan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 sebesar Rp. 115.509.509.302,20

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 yang menjadi Indikator Kinerja Utama Bapenda pada sasaran pertama yaitu Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Dengan Indikator Kinerja Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2021 Dengan Target 7,98% terealisasi sebesar 9,77% dengan capaian 122,43%.

Berdasarkan Rekapitulasi Laporan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 yang terdiri dari 11 jenis Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah hanya terealisasi sebesar 87,88%, ini disebabkan :

Karena Masih Adanya pandemi Covid-19, aktivitas masyarakat dibatasi demi mencegah penularan Covid-19 sehingga berimbas kepada sektor ekonomi.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Penerimaan Pajak Daerah yang dikelola Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan dilaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi secara Optimal dengan cara :

- a. Melakukan Pendataan Terhadap Subjek Dan Objek Pajak Daerah
- b. Meningkatkan Koordinasi Dengan Instansi Terkait
- c. Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian Penerimaan Daerah
- d. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Melalui Kegiatan Penyuluhan Pajak Pajak Daerah
- e. Terus Berupaya Menggali Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.